

ABSTRAK

Felicia Kusnadi (01656230005)

KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DALAM HAL PENGHADAP ADALAH TERPIDANA

(XIII + 132 halaman; 2 tabel; 3 lampiran)

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta Notaris yang dibuat dalam kondisi penyalahgunaan keadaan, khususnya yang melibatkan individu yang berstatus sebagai terpidana. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kompleksitas mengenai kewenangan dan kapasitas hukum seorang terpidana dalam melakukan perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta Notaris. Fokus penelitian ini mengkaji pengaturan akta Notaris yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan terhadap terpidana dan bagaimana tanggung jawab Notaris serta akibat hukum dari akta tersebut (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 805 PK/Pdt/2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, kajian literatur, serta telaah terhadap putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa seorang terpidana tetap memiliki hak keperdataan dan dapat melakukan tindakan hukum termasuk pembuatan akta Notaris selama prosedur yang berlaku diikuti dengan benar dan sepanjang tidak dicabut melalui putusan hukum yang sah. Namun, kondisi terpidana seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang menciderai prinsip kehendak bebas. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika pihak lain mengambil keuntungan dari kondisi ketidakberdayaan terpidana, sehingga akta yang ditandatangani dalam keadaan tersebut menjadi cacat kehendak. Notaris sebagai pejabat umum wajib patuh pada kode etik serta Undang-Undang Jabatan Notaris serta memastikan bahwa akta dibuat secara sadar dan bebas. Penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana peralihan hak atas tanah dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jika suatu akta dibuat dengan penyalahgunaan keadaan, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum atau mengalami degradasi kekuatan hukum. Selain itu, Notaris yang melakukan kesalahan akan dikenakan tanggung jawab hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi: 82 (1945-2025)

Kata Kunci: Terpidana, Akta Notaris, Tanggung Jawab Notaris

ABSTRACT

Felicia Kusnadi (01656230005)

THE LEGAL VALIDITY OF NOTARIAL ACTS EXECUTED WITH A CONVICTED PERSON AS APPEARING PARTY

(XIII + 132 pages; 2 table; 3 attachments)

This research discusses the legal validity of notarial deeds created under conditions of undue influence, specifically involving convicted individuals. The background of this study stems from the complexity surrounding the authority and legal capacity of a convicted person to carry out legal actions, particularly concerning the creation of Notarial deeds. The focus of this research is to examine the regulation of Notarial deeds created under conditions of undue influence involving convicted persons, as well as the responsibilities of Notaries and the legal consequences of such deeds (Case Study of the Supreme Court Review Decision No. 805 PK/Pdt/2021). This research uses a normative-empirical approach, combining analysis of laws and regulations, literature studies, and reviews of court decisions. The findings of this study indicate that a convicted person still retains civil rights and can carry out legal actions, including the creation of Notarial deeds, as long as the procedures are properly followed and have not been revoked by a legally binding court decision. However, the condition of being a convicted person often causes psychological pressure that undermines the principle of free will. Abuse of circumstances occurs when another party takes advantage of the convicted person's vulnerability, causing the deed signed under such circumstances to be defective in terms of consent. As a public official, a Notary must adhere to the code of ethics and the Notary Public Act, ensuring that the deed is made consciously and freely. The use of an absolute power of attorney for the transfer of land rights is prohibited under Government Regulation No. 24 of 1997. If a deed is made under abuse of circumstances, it becomes null and void or loses its legal force. Additionally, a Notary who makes an error will be held legally responsible and subject to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations.

References: 82 (1945-2025)

Keywords: Convicted Person, Notarial Deed, Notary Responsibility